

**PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
PENINGKATAN RELEVANSI PENDIDIKAN**
(Studi Relevansi pendidikan Kerjasama UPI dengan balitbang
Kemendiknas, 2010)

Disampaikan pada
Seminar Internasional Pendidikan Luar Sekolah,
yang diselenggarakan oleh Prodi PLS-SPS UPI,
Bandung Tanggal 29 November 2010.

Oleh
Prof. Dr. Ace Suryadi, M.Sc. Ph.D.
(Guru Besar Ekonomi Pendidikan, UPI)

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pendidikan yang ekspansif, belum menyentuh permasalahan keselarasan pendidikan secara terfokus. Keselarasan pendidikan sebagai salah satu kebijakan Mendiknas dalam prioritas tertinggi adalah sebuah keniscayaan. Kajian ini dilakukan oleh Tim gabungan Balitbang dengan Universitas Pendidikan Indonesia, melalui Pusat Kajian Pendidikan dan Pengembangan SDM yang dipimpin oleh Prof. Ace Suryadi, M.Sc. Ph.D. Tim ini bekerja 8 bulan melalui, pengumpulan data statistik, Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) dengan para praktisi dari lima daerah, analisis data, serta diskusi dengan para ahli telah melahirkan konsep laporan lengkap dan naskah ini adalah ringkasan eksekutif dari laporan kajian tersebut.

Indonesia dewasa ini mengalami berbagai perubahan menuju industri yang dibarengi oleh berbagai transformasi jenis pekerjaan dan kualifikasi jabatan. Perubahan menuju industri ini mendorong perubahan dalam jenis dan tingkatan pengetahuan, kecakapan dan keahlian, yang dibutuhkan oleh sektor-sektor industri. Struktur jabatan dan pekerjaan turut mengalami perubahan dan hal ini ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam investasi, pendayagunaan teknologi tepat guna, sistem pengupahan, manajemen usaha, serta antisipasi fluktuasi pasar barang dan jasa baik nasional maupun global.

Proses industrialisasi menurunkan kesempatan kerja pada sektor pertanian dan perlahan-lahan berganti dengan kesempatan kerja di sektor manufaktur. Pada tahap berikut, industri berteknologi tinggi akan berkembang yang berakibat pada menurunnya lapangan kerja subsistensi. Gejala ini semakin kentara sejalan

dengan tumbuhnya industri berteknologi tinggi (*high-tech industry*), industri berbasis pengetahuan (*knowledge base industry*) dan industri kreatif (*creative industry*) yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Pendayagunaan teknologi tinggi dapat mendorong perubahan komposisi pekerja menurut jenis jabatan dan keahlian. Di negara-negara berkembang, proporsi pekerja tidak terampil, operator, dan pengrajin tampak masih dominan. Namun tumbuhnya industri membutuhkan keterampilan, kecakapan, profesionalitas, intelektual dan daya cipta yang tinggi. Sumbangan para teknisi perlahan-lahan menggantikan buruh kasar dan pekerja tidak terampil (*unskilled workers*) yang terus berkurang. Industri manufaktur dan industri berteknologi tinggi, di Indonesia juga mulai tumbuh industri kreatif sebagai salah satu pilihan terbaik untuk memacu produktivitas nasional. Industri kreatif juga dapat memperluas lapangan kerja bagi lulusan pendidikan yang tumbuh setiap tahunnya. Relevansi program pendidikan perlu ditingkatkan, dengan mengarahkan program pendidikan pada pengembangan kreativitas, daya cipta, dan kemampuan belajar sepanjang hayat sebagai dasar untuk menumbuhkan industri kreatif.

Kajian relevansi lulusan pendidikan tahun 2010 ini diarahkan pada dua komponen pendidikan dalam pengembangan kualitas SDM, yaitu: (1) pendidikan untuk penyiapan infrastruktur SDM sebagai fondasi sistem pendidikan nasional; dan (2) pendidikan kejuruan sebagai pendidikan terminal, yang meliputi SMK, pendidikan non-formal kejuruan, dan pendidikan tinggi. Namun, kajian relevansi pendidikan tinggi perlu dilakukan secara khusus mengingat kompleksitasnya yang tidak mungkin ditangani melalui kajian ini karena sumberdaya yang sangat terbatas.

B. ISU DAN PERMASALAHAN RELEVANSI PENDIDIKAN DEWASA INI

Sesuai dengan temuan-temuan yang diperoleh dari kajian ini, dikemukakan beberapa kesimpulan berkaitan relevansi pendidikan, berdasarkan jenis, jalur dan jenjang pendidikan sebagai berikut.

1. Pendidikan Dasar

Pemerintah memberikan layanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan berkeadilan, serta relevan dengan kebutuhan lulusan sebagai warga masyarakat dan negara. Pendidikan dasar membentuk karakter, literasi dasar, dan kecakapan dasar bagi semua warga negara melalui pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Pelayanan yang berkeadilan tidak membedakan suku bangsa, golongan, jenis kelamin, serta latar belakang sosial-ekonomi peserta didik.

Kriteria keberhasilan relevansi pendidikan dasar bukanlah dalam ukuran banyaknya gedung sekolah, guru, sarana belajar, dan banyaknya pengetahuan yang dihafal oleh peserta didik, tetapi yang lebih penting adalah pembentukan karakter dan kemampuan dasar untuk belajar untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang bertanggungjawab.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan gejala yang memprihatinkan. Satuan pendidikan dasar telah menjadi mesin pencetak pengetahuan bagi peserta didik. Pendidikan dasar oleh para penyelenggara lebih difahami sebagai "kumpulan mata pelajaran" yang diajarkan oleh guru di SD, SMP, MI, MTs, atau paket A dan Paket B. Pemahaman ini dalam kenyataannya telah mereduksi esensi pendidikan dasar yang sejatinya membentuk karakter dan kemampuan dasar untuk belajar, menjadi suatu sekumpulan proses pengajaran teori dan hafalan di dalam kelas yang dikukur melalui tes hafalan. Pendidikan dasar tidak akan pernah relevan dan tidak berfungsi sebagai fondasi yang kokoh baik membentuk karakter dan peningkatan mutu pendidikan pada jenjang-jenjang berikutnya jika keadaan ini dibiarkan.

Pendidikan dasar merupakan program pendidikan formal permulaan untuk semua warga negara dengan substansi pendidikan yang tidak diorganisasikan dalam bentuk kumpulan mata pelajaran, tetapi perlu dikemas secara integral dalam berbagai program pendidikan berbasis sekolah (*school-base programs*), yaitu: (1) pendidikan karakter, (2) pendidikan kemampuan dasar untuk belajar (*basic literacy*), (3) pendidikan pengetahuan dasar, dan (4) pendidikan kecakapan hidup sebagai pilihan. Pendidikan dasar juga merupakan program pendidikan yang berlaku umum untuk semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia dan sejarah nasional.

2. Pendidikan Menengah Atas

Relevansi SMA dapat dianalisis dari sisi fungsinya sebagai satuan pendidikan pra-akademik untuk menyiapkan peserta didik melanjutkan ke pendidikan tinggi atau pendidikan berkelanjutan dalam ranah PNF. SMA sebagai program pendidikan menengah,¹ SMA membentuk dan mengembangkan seluruh potensi siswa agar memiliki dasar yang kuat untuk berfikir ilmiah melalui proses

¹ Di beberapa Negara Maju seperti di Singapura, Pendidikan Menengah adalah bagian dari pendidikan universal (compulsory). Di US, yang termasuk ke dalam pendidikan universal adalah 14 Tahun, yaitu dari Kindergarten hingga kelas 12 (K-12). Di Malaysia dan Korea selatan adalah 11 tahun (K-9), sedangkan di Indonesia adalah Kelas 1 SD sampai Kelas 3 SMP (1-9) karena PAUD tidak termasuk ke dalam pendidikan universal.

pembelajaran yang intensif dan sistematis. Peserta didik bukan hanya diberikan banyak teori dan pengetahuan yang dihafal, bukan juga banyaknya teori yang telah diajarkan oleh guru (daya serap) sebagai ukuran keberhasilan, tetapi memiliki kecakapan dasar untuk mencari dan meneliti sendiri pengetahuan yang berguna melalui proses belajar inquri dan bersifat mandiri. Kecakapan dasar harus ditumbuhkan melalui program-program pendidikan, kurikulum dan pembelajaran, serta pendekatan dan proses pengelolaan sekolah.

Pendidikan di SMA masih menghadapi masalah dalam kaitan dengan relevansi kurikulum, pembelajaran, dan manajemen sekolah yang menciptakan proses belajar siswa yang mutunya rendah (*rote learning*). Proses pembelajaran kurang menumbuhkan potensi dan kreativitas siswa, tetapi menyuguhkan teori dan pengetahuan yang dihafal dengan muatan teoretis yang padat. Proses pembelajaran seperti ini sudah menjadi “tipikal” budaya belajar siswa di Indonesia, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Sekolah belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang nyaman, menarik dan menyenangkan bagi siswa untuk belajar optimal, sehingga prestasi belajar siswa rendah dan terkesan semakin buruk akhir-akhir ini.

3. Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)

Proses pendidikan di pendidikan menengah kejuruan diindikasikan terdapat gejala yang konsisten bahwa program pendidikan di SMK, terisolasi dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri. Program pendidikan bersifat “*supply driven*” karena jenis program studi, materi pendidikan, cara mengajar, media belajar, evaluasi dan sertifikasi lebih ditentukan oleh *provider* utama, yaitu Pemerintah. Program pendidikan kejuruan di sekolah kaku dan tidak lentur terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja. Program pendidikan belum berorientasi terhadap kebutuhan pasar kerja yang berubah, sehingga terjebak ke dalam pemeo “membidik sasaran yang bergerak” (*aimed at the moving target*). Jumlah rumpun dan program studi “relatif tetap” tidak selaras dengan kebutuhan lapangan kerja yang berubah². Menurut statistik pengangguran, SMK merupakan satuan pendidikan yang melahirkan angka pengangguran tertinggi (Sakernas, 2005 s/d 2009).

² Peserta FGD di lima propinsi pada umumnya menilai bahwa Lulusan SMK belum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Hal ini terbukti dari pengalaman Kadinda Sumsel bahwa dalam testing saringan masuk untuk pekerja pada DUDI (tahun 2000), dari sekian ribu pelamar yang di test tidak ada satupun yang lulus test karena ternyata kurikulumnya tidak selaras dengan apa yang dibutuhkan DUDI”. Di samping itu data statistik pengangguran menunjukkan bahwa SMK adalah salah satu satuan pendidikan yang memiliki angka penganggur yang paling besar

Pendidikan kejuruan melalui kursus atau pendidikan kecakapan hidup (PKH) lebih relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Mereka lebih luwes dan dapat mengikuti perubahan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan kursus lebih bersifat “*demand driven*”, karena jenis program pendidikan berubah karena berubahnya kebutuhan para penerima kerja. Program pendidikan kursus dan PKH dapat dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan sekarang juga.

Pendidikan kejuruan di sekolah telah menimbulkan permasalahan struktural yang menjadikan kurangnya relevansi dengan lapangan kerja. Perkembangan program studi bersifat konstan (*constant*) karena perangkat pendidikan dibentuk secara legal-formal, yang dapat membatasi ruang kreativitas para pengelola program dan terkesan “menghindari” perubahan. Sebaliknya dunia usaha terus berubah (*variable*), bahkan teknologi baru-pun lebih dahulu masuk ke dunia usaha karena mengikuti tuntutan pasar. Di lain pihak, program-program kursus sebagai *training providers* memiliki kesamaan sifat dengan dunia usaha dan industri, mereka bersifat “variable” terhadap tuntutan pasar yang terus berubah. Oleh karena itu integrasi antara pendidikan kejuruan di SMK dan kursus perlu dipertimbangkan sebagai agenda kebijakan pembangunan pendidikan kejuruan ke depan.

4. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi diindikasikan terdapat gejala yang konsisten bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, semakin tinggi angka pengangguran. Kondisi ini konsisten dalam lima tahun terakhir, akibat dari terjadinya gejala ketimpangan antara struktur persediaan tenaga kerja dengan struktur lapangan kerja menurut pendidikan. Timpang, karena pada waktu pendidikan menawarkan pekerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi, lapangan kerja masih bersifat *subsistent* karena ternyata lebih membutuhkan pekerja berpendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan sama sekali.

Menurut ISCO (*International Classification of Occupation*), ada gejala yang konsisten; bahwa pendidikan nasional belum menumbuhkan kemandirian bagi lulusan. Kemandirian dalam berusaha justru lebih banyak dilakukan oleh yang berpendidikan rendah, walaupun produktivitasnya rendah. Gejala menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin rendah persentase pekerja yang berusaha secara mandiri. Gejala ini menunjukkan bahwa investasi pendidikan berdampak buruk terhadap menurunnya kemandirian pekerja. Untuk memacu keselarasan pendidikan, maka program pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang mandiri dan profesional. Kenyataan justru sebaliknya,

kemandirian pekerja lulusan pendidikan tinggi belum tumbuh seperti yang diharapkan.

C. USUL KEBIJAKAN KESELARASAN PENDIDIKAN

1. Pendidikan Dasar

Usulan kebijakan pada pendidikan dasar dengan merujuk pada permasalahannya, maka program pendidikan dasar perlu dikaji ulang terutama berkaitan dengan struktur program, substansi program, esensi program, serta kriteria keberhasilannya. Pembangunan pendidikan dasar melalui pengadaan USB, RKB, sarana belajar, buku teks pelajaran, serta pengadaan sarana/prasarana fisik lainnya, perlu dikaji ulang, karena, menurut PP No. 38/2007, sebagian besar program ini merupakan urusan kabupaten/kota. Pemerintah pusat bertugas melahirkan kebijakan, menetapkan standar, mengembangkan kapasitas, menetapkan subsidi, insentif dan disinsentif atas dasar keberhasilan sekolah, serta pengendalian mutu pendidikan secara nasional.

Peranan pemerintah berubah sejalan dengan kebijakan otonomi, Kemendiknas seyogyanya tidak mengurus pemenuhan tenaga, sarana-prasarana, dan biaya operasi pendidikan, kecuali menetapkan standar-standarnya. Kebijakan Kemendiknas sebaiknya lebih banyak berurusan dengan: (1) muatan substansi pendidikan dasar, yaitu visi, misi, tujuan, arah, dan orientasi program; (2) standar kompetensi peserta didik; (3) standar kompetensi guru; (4) organisasi kurikulum dan struktur program pendidikan; serta (5) pengendalian dan penjaminan mutu secara nasional. Standar-standar pendidikan dasar melalui *networking* dan *bechmarking* secara internasional sebaiknya perlu untuk dikaji ulang, setidaknya di lingkungan ASEAN. Kemendiknas sebaiknya menghindari urusan yang bersifat fisik, sehingga dapat mencurahkan perhatian untuk mengurus esensi dan substansi pendidikan dasar yang selama ini cenderung agak terabaikan.

Isu kebijakan yang mendasar adalah melakukan restrukturisasi program dan kurikulum pendidikan dasar, termasuk sistem pembelajaran di sekolah. Program pendidikan dasar perlu direkonstruksi dan dibangun kembali agar semakin relevan dengan kebutuhan lulusan untuk hidup sebagai warga negara produktif dan bertanggungjawab (*productive and responsible citizen*). Pendidikan dasar setidaknya memiliki empat program, yaitu: Program literasi dasar; Program

Pengetahuan Dasar; Program kecakapan hidup; dan Program pendidikan karakter.

Proram Literasi Dasar; adalah program pendidikan literasi (*literacy education*), yang meramu materi ajar bahasa Indonesia dan matematik dasar, untuk menumbuhkan lima jenis kompetensi literasi dasar: (a) *membaca*, memahami materi bacaan dengan cepat; (b) *menulis*, menuangkan gagasan melalui tulisan sederhana dan mudah difahami; (c) *menyimak*, menangkap isi pembicaraan orang lain secara cepat dan tepat; (d) *menutur*, mengungkapkan gagasan lisan secara sederhana dan mudah difahami; dan (e) *berhitung*, memahami logika angka, bidang dan ruang dalam praktek sehari-hari. Kelima jenis literasi dasar itu tidak diberikan melalui proses pembelajaran konvensional, tetapi dilatihkan secara intensif kepada siswa paling tidak 3-4 jam per hari. Substansi pokok pendidikan literasi dirancang oleh Balitbang dan dikembangkan melalui kerjasama guru pada masing-masing sekolah.

Program Pengetahuan Dasar; adalah program pendidikan dasar yang terdiri dari IPS, IPA, literasi ekonomi, dan sejenisnya dengan materi yang disusun sesuai dengan potensi dan permasalahan lingkungan. Proses belajar dikemas melalui mata-mata pelajaran yang jumlahnya tidak banyak, sebutlah misalnya paling banyak empat mata pelajaran, proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk praktek lapangan dengan memanfaatkan kemampuan siswa membaca, menulis, menyajikan secara lisan, dan melaporkan temuannya secara tertulis. Program pengetahuan dasar adalah aplikasi dari pendidikan naturalistik yang dibelajarkan secara tematik melalui pemecahan masalah lingkungan dengan memanfaatkan kemampuan literasi dasar peserta didik.

Program Kecakapan Hidup; adalah program pendidikan kecakapan yang bertujuan untuk menerapkan materi-materi pelajaran yang relevan dalam ranah perilaku. Perlu dibuat menu program *life skills* yang dapat dipilih oleh peserta didik secara individual atau kelompok sesuai dengan bakat dan minatnya, untuk mendalami salah satu jenis kecakapan hingga mencapai penguasaan tertinggi dan khusus. Pelaksanaan program *life skills* dapat disediakan oleh sekolah atau sekolah dapat memilih *providers* lain di luar sekolah yang bersangkutan, seperti: cabang olahraga, cabang kesenian, organisasi, kegiatan usaha, media dan komunikasi (wartawan atau MC muda), ICT, kegiatan produksi barang, dan sejenisnya.

Program Pendidikan Karakter; adalah program pendidikan yang secara integral meramu materi Pendidikan Agama, PKN, dan Sejarah Nasional, serta materi pelajaran lain secara integral. Pendidikan karakter yang dirancang dalam bentuk mata pelajaran yang diajarkan di kelas pastilah tidak akan membawakan hasil. Pendidikan karakter akan berhasil jika institusi pendidikan juga memiliki karakter (*an institution of character*). Pendidikan karakter harus dikembangkan dan diterapkan dalam level institusi sekolah bersamaan dengan diajarkan dalam level individu. Pendidikan karakter dirancang dalam bentuk rangkaian kegiatan siswa secara sistematis dan terprogram di sekolah berdasarkan norma-norma karakter yang berlaku untuk semua pihak di sekolah. Kegiatan-kegiatan siswa seperti: berdoa bersama, sembah yang berjamaah, peringatan hari-hari besar, upacara hari besar nasional, cara berdemokrasi, kegiatan ekonomi produktif, kompetisi seni dan olahraga, kebersihan diri dan lingkungan, pra-karya, 'hari krida' dan sejenisnya, dapat diprogramkan sebagai kegiatan rutin terjadwal bagi peserta didik di sekolah. Program pendidikan karakter perlu diteliti, dirancang dan dikembangkan sedemikian rupa sebelum diaplikasikan secara meluas.

2. Pendidikan di SMA

Permasalahan yang cukup mendasar dalam pendidikan di SMA sebagai pendidikan pra-akademik adalah kurikulum, pembelajaran, dan manajemen sekolah yang kurang kondusif untuk belajar secara optimal karena proses belajar siswa yang rendah kualitasnya (*rote learning*). Proses ini terbukti tidak mampu menumbuhkan kreativitas siswa, karena pembelajaran lebih "menjejali" siswa dengan sejumlah besar pengetahuan teori dan hafalan dengan beban materi mata yang padat. Perlu dilakukan perubahan mendasar dalam menumbuhkan budaya belajar (*learning culture*) melalui penciptaan proses yang nyaman, menyenangkan, dan menarik sehingga peserta didik dapat belajar optimal.

Pendidikan di SMA sebagai pendidikan pra-akademik untuk mengikuti jenjang strata pendidikan tinggi, memiliki kemiripan dengan pendidikan dasar yang juga sebagai fondasi untuk pendidikan lebih lanjut. Kedua jenis pendidikan ini sama yaitu pendidikan umum yang relevansinya tidak tepat jika diukur berdasarkan kebutuhan lapangan kerja. Oleh karena itu empat program pendidikan dasar tersebut di atas yang bersifat generik juga dapat diterapkan melalui pendidikan di SMA,

Empat program pendidikan di atas, perlu juga diterapkan di SMA, namun bobot program pendidikan menengah harus lebih menekankan pada Program

Pendidikan Kemampuan Belajar (*learning tools*), dan Program Substansi Belajar (*learning content*).

Pertama, *learning tools*; adalah program lanjutan dari pendidikan dasar, yaitu kemampuan membaca, menulis, mendengar, berbicara serta matematik yang lebih tinggi tingkatannya dalam kerangka pendidikan pra-akademik. Siswa harus dilatih untuk mencari dan meneliti untuk memperoleh pengetahuan melalui membaca dan belajar mandiri. Dengan pengetahuan yang baru, siswa dilatih mengkomunikasikan pengetahuannya kepada orang lain, melalui kemampuan menulis dan mempresentasikannya di hadapan khalayak. Kemampuan ini akan semakin tajam jika dilengkapi oleh program pendidikan yang sama bobotnya dengan "*mathematical reasoning ability*" dengan penekanan pada aplikasi logika dan penalaran matematis untuk melatih ketajaman dalam memecahkan masalah.

Kedua, *learning content*; adalah inti dari pendidikan di SMA sebagai pendidikan pra-akademik. Program pendidikan menengah diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran dengan materi yang tidak padat. Proses pembelajaran di SMA sebaiknya mulai meninggalkan pendekatan yang *behavioristics* dan *structural* dengan mengajarkan siswa terpusat pada pokok-bahasan. Pendekatan pembelajaran sebaiknya mulai mengembangkan proses yang lebih *positivistics* yaitu pembelajaran yang terpusat pada kompetensi, dengan memusatkan perhatian pada penelitian, pengamatan, dan pembahasan terhadap berbagai permasalahan lingkungan dengan menggunakan sebanyak mungkin kemampuan belajar (*learning tools*) yang telah dimiliki oleh peserta didik.

Ketiga, Program kecakapan hidup; dilakukan di SMA dengan pendalaman berbagai jenis kecakapan agar siswa secara perorangan menguasai salah satu jenis kecakapan hidup, sebagai dasar untuk dikembangkan pada pendidikan lebih lanjut. Misalnya, jika siswa berbakat dalam bulu tangkis, maka program *life skill* bidang ini dapat disediakan untuk siswa agar dimungkinkan untuk memperoleh penguasaan paling tinggi dalam bulu tangkis sebagai sandaran untuk hidupnya kelak. Begitu juga untuk siswa yang berbakat dalam pekerjaan wartawan, MC, bernyanyi, menari, atau membuat desain kreatif, dan sejenisnya.

3. Pendidikan Kejuruan (SMK, Kursus, dsb.)

Pemerintah bertugas melayani penyelenggaraan semua jenis pendidikan kejuruan yang untuk menghasilkan lulusan yang produktif baik yang ingin bekerja maupun yang ingin menjadi pengusaha produktif dan mandiri. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk sebagian besar penduduk karena sasarannya

adalah semua angkatan kerja yang berjumlah di atas 110 juta ditambah calon angkatan kerja yang masih bersekolah.

Belajar dari pengalaman Korea³, produktivitas pekerja Korea Selatan tidak ditingkatkan melalui SMK atau Politeknik yang sarannya hanya sebagian kecil angkatan kerja. Pendidikan sepanjang hayat (*life-long education*) bagi Korea jauh lebih penting karena sarannya bukan hanya anak usia sekolah⁴, tetapi juga seluruh angkatan kerja⁵, pekerja, atau pengusaha yang ingin meningkatkan produktivitasnya. Masyarakat dilayani melalui PNF kecakapan hidup (*life skills*), pelatihan kerja, berbagai kursus keterampilan, pendidikan kewirausahaan termasuk bagi penduduk miskin, serta pengakuan terhadap hasil belajar sebelumnya (*recognition of prior learning*) serta bentuk pendidikan berkelanjutan lainnya. Kebijakan perluasan SMK perlu ditinjau kembali, karena program tersebut baru melayani 0,4% dari calon angkatan kerja muda dengan biaya investasi yang cukup mahal, ditambah kenyataan bahwa lulusannya memiliki angka pengangguran tertinggi⁶.

Tujuan pokok pendidikan kejuruan adalah menghasilkan pelaku ekonomi produktif; pekerja yang kreatif, dan pengusaha mandiri⁷. Pendidikan kejuruan tidak boleh terpisahkan dari program-program perekonomian nasional, serta dunia usaha dan industri sebagai "penerima kerja". Dunia usaha dan industri setiap saat membutuhkan pekerja terampil, ahli, dan profesional dalam perspektif sebagai pelaku ekonomi. Keberhasilan pendidikan kejuruan bukan diukur dari perspektif *provider* seperti ujian nasional atau ijazah, tetapi diukur dari perspektif *users*, seperti: daya-serap lapangan kerja, tingkat produktivitas, peningkatan karier, dan penghasilan lulusan. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan, Kemdiknas perlu berkoordinasi secara sistemik dengan para pemegang kebijakan dan program perekonomian nasional, serta dengan dunia usaha dan dunia industri.

Supply tenaga yang cakap dan terampil tidak mungkin dipenuhi seluruhnya oleh SMK dan politeknik, karena program studi yang ditawarkan jauh lebih sedikit ketimbang jenis keterampilan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh lapangan

³ Cathy Andrew, Cindy Howe, John Kane, Reese Mattison (2007) "*Dynamic Korea; Education Policies and Reform*" Group Project: EPS530Z-Spring 2007.

⁴ Jumlah siswa SMK tahun 2009 adalah 1,6 juta orang, sehingga calon angkatan kerja lulusan SMK berjumlah sekitar 500 ribu orang setiap tahunnya atau sekitar 12% dari jumlah angkatan kerja baru, atau sekitar 0,4% dari jumlah angkatan kerja Indonesia pada tahun yang sama.

⁵ Angkatan kerja berjumlah lebih dari 113 juta orang di Indonesia berdasarkan Sakernas tahun 2009.

⁶ Badan Pusat Statistik (2008) *Survey Sosial Ekonomi Nasional*, Jakarta BPS

⁷ Depdiknas, (2005) "*Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2009*.", Jakarta Sekretariat Jenderal Depdiknas

kerja. Konsep SMK perlu diperluas tidak hanya menyelenggarakan pendidikan formal kejuruan akan tetapi juga menyelenggarakan berbagai jenis kursus atau pelatihan singkat yang sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pasar (*demand driven*), serta pengakuan terhadap pengalaman belajar yang lalu (*recognition of prior learning*) seperti: pendidikan berkelanjutan, pendidikan profesional berkelanjutan, serta berbagai bentuk *community colleges*.

Pengangguran merupakan permasalahan yang perlu diatasi, *mind set* yang bias tentang pendidikan formal (*school education bias*) perlu dirubah. Kebijakan perluasan SMK perlu dirubah menjadi perluasan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan dalam arti luas, seperti: pendidikan kejuruan non-sekolah, kursus-kursus, politeknik, pelatihan kerja, PKH, pendidikan keterampilan, kredit mikro, pendidikan wirausaha yang dikemas dalam berbagai bentuk pendidikan berkelanjutan dan pendidikan profesional berkelanjutan. Perluasan pendidikan kejuruan perlu ditempuh oleh Kemdiknas dengan berkordinasi antar-instansi agar pendidikan kejuruan memperoleh perimbangan dengan upaya perluasan investasi lapangan kerjanya.

4. Peningkatan Relevansi Pendidikan Tinggi

a. Pendidikan Vokasi

Pengangguran menurut bidang keahlian terdapat dua kelompok keahlian dengan karakteristik yang berbeda. *Pertama* adalah Kelompok lulusan diploma dengan pengangguran tinggi karena kualifikasinya tanggung⁸ (*underqualified*) jika hanya setingkat diploma karena yang lebih diperlukan adalah sarjana, magister bahkan doktoral. *Kedua* adalah lulusan diploma PT yang terlalu tinggi kualifikasinya⁹ (*over-qualified*), yaitu lapangan kerja yang justru lebih banyak membutuhkan tenaga pelaksana teknis atau operator yang cukup dikerjakan oleh lulusan SMA atau lebih rendah tetapi yang terlatih (*well trained*), terampil, dan mahir. Jenis-jenis pekerjaan manajemen keuangan dan administrasi perkantoran masih cukup terbuka, namun pekerja jenis ini cukup dibentuk melalui aplikasi komputer yang dapat berubah dengan cepat seiring dengan teknologi ICT yang berkembang pesat. Agenda pengembangan program diploma PT adalah sebagai berikut.

⁸ seperti psikologi, kehutanan, pendidikan/keguruan, manajemen perkantoran, arsitektur, ekonomi, humaniora, kedokteran, bahasa dan sastra, IPA, dan matematik

⁹ seperti tenaga komunikasi-transportasi, kejuruan pertukangan, kerajinan, industri, komputer, atau manajemen bisnis

- 1) Pembukaan program pendidikan vokasi tidak dilakukan berdasarkan ijin yang sangat ketat dari Kementerian atau dinas pendidikan tetapi harus lebih banyak ditentukan oleh pasar, yang dapat dibuka pada waktu dibutuhkan dan ditutup jika pasar tidak membutuhkan lagi.
- 2) Program pendidikan yang hanya diselenggarakan untuk menyiapkan tenaga-tenaga pelaksana di lapangan serta tenaga pertukangan atau kerajinan, tidak perlu diadakan pendidikan diploma, tetapi cukup disiapkan pada tingkat pendidikan menengah kejuruan plus kursus keterampilan yang sesuai;
- 3) pembentukan program diploma manajemen keuangan dan administrasi perkantoran perlu sering diremajakan seiring dengan perkembangan program berbasis teknologi informasi setiap waktu;
- 4) Pendidikan vokasi mungkin tidak diperlukan untuk menyiapkan pekerja yang cakap dan mahir bidang kesenian, senirupa dan sejenisnya. Pekerjaan bidang ini lebih ditentukan oleh bakat dan minat seseorang, sehingga lulusan setingkat SMA saja sudah memadai. Jenis-jenis pekerjaan seperti karikatur, RBT, film, multimedia, design, periklanan, musik merupakan produk kreatif yang berbasis kultur, dan Indonesia berpotensi untuk dapat bersaing dan menghasilkan devisa Negara cukup besar dari sektor ini;
- 5) Program yang perlu dikembangkan ke depan adalah pendidikan vokasi dalam berbagai cabang industri kreatif, sebagai salah satu prioritas Pemerintah. Program pendidikan vokasi akan memberikan nilai tambah bagi mereka yang berbakat di bidang seni dan senirupa jika dikaitkan dengan pengembangan industri kreatif, untuk membantu mereka melahirkan berbagai inovasi, teknologi pengemasan, serta pemasaran yang lebih efektif; dan
- 6) Penyiapan tenaga professional dalam konteks pengembangan *agro-industry* diperlukan setingkat magister atau doktoral yang mampu megembangkan produk-produk baru pertanian serta pemasarannya. Program pendidikan keahlian dan penelitian bidang pertanian, peternakan dan perikanan masih akan tetap dibutuhkan walaupun tidak dalam jumlah besar. Indonesia perlu mengembangkan program pendidikan vokasi dalam berbagai bidang industri agro, yaitu pertanian komersial dengan penggunaan teknologi tepat guna baik pra- maupun pasca panen.

b. Pendidikan Sarjana

Pertama, pengangguran sarjana terjadi karena gejala *over-supply* yaitu jumlah kebutuhan lebih kecil dibanding jumlah yang dihasilkan¹⁰, tetapi terus diproduksi. Sarjana pendidikan (guru), misalnya, memang dibutuhkan namun tidak seluruh bidang keahlian karena ada bidang pengajaran yang kurang dibutuhkan¹¹, dan ada juga jurusan-jurusan LPTK yang sudah jenuh¹² dan perlu dibatasi. Pendidikan sarjana LPTK perlu memprioritaskan program-program studi yang paling dibutuhkan. LPTK perlu melakukan studi kebutuhan dan persediaan guru bersama *users*, yaitu Dinas Pendidikan yang dianggap paling mengetahui bidang yang sangat atau kurang dibutuhkan. LPTK juga perlu melaksanakan program rutin penelitian pasar tenaga guru melalui survey sekolah.

Kedua, pengangguran terjadi karena gejala *over-qualification*¹³ yaitu kualifikasi sarjana yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh lulusan pendidikan di bawahnya, misalnya lulusan diploma atau SMA yang terlatih melalui kursus singkat. Program pendidikan tinggi dalam bidang-bidang ini cukup hanya diselenggarakan sampai dengan tingkat program diploma yang menyiapkan tenaga pelaksana lapangan. Tenaga pertukangan atau kerajinan, cukup disiapkan pada tingkat pendidikan menengah kejuruan atau kursus keterampilan yang sesuai.

Ketiga, beberapa jenis tenaga sarjana, seperti kesenian dan senirupa yang dapat bekerja mandiri dan profesional, tidak memerlukan lapangan kerja perkantoran. Sarjana kesenian dan senirupa adalah pekerja profesional karena bakatnya, bahkan pendidikan formal setinggi apapun tidak dapat menambah bakatnya. Pekerja kesenian dan senirupa paling tinggi cukup memerlukan program vokasi, karena pekerjaan ini pada dasarnya tidak memerlukan sarjana, magister, atau doktor. Program pendidikan sampai tingkat vokasi akan memberikan nilai tambah bagi yang berbakat di bidang seni dalam rangka melahirkan produk-produk kreatif, serta membantu melahirkan inovasi, teknologi kemasan, serta pemasaran produk yang lebih baik dibandingkan dengan cara-cara tradisional.

¹⁰ Seperti kesehatan masyarakat, pendidikan & keguruan, psikologi, agama, bahasa dan sastra, dan arsitektur, IPA, dan ekonomi

¹¹ Seperti guru-guru bidang Matematik, IPA, matematika, teknologi, bahasa Inggris, dsb

¹² Seperti guru ilmu sosial, guru bahasa dan sastra, dan sejenisnya

¹³ seperti sarjana komunikasi masa, komputer, transportasi & komunikasi, dan manajemen keuangan.